

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Revolusi industri yang terjadi di Eropa telah menciptakan tatanan dunia baru. Setiap manusia berusaha menghilangkan ketidakpastian dengan menaklukkan dunia yang memproduksinya dan menghapus semua misteri atau mitos serta mengganti iman dengan nalar<sup>1</sup>. Konsekuensi dari hal tersebut adalah adanya keinginan untuk terus hidup dengan kekuatan individu tanpa ketergantungan dengan yang lain. Revolusi industri pada perkembangannya menuntut untuk adanya industrialisasi dengan model produksi dan tentunya penciptaan pasar sebagai ruang distribusi hasil produksi. Sistem ekonomi kapitalisme yang menjiwai industrialisasi tersebut pada akhirnya membutuhkan pasar yang lebih luas untuk menjaga regulasi sistem yang ada.

Sistem kapitalisme yang merupakan perwujudan dari semangat liberalisme sangat menyangkan diri pada proses produksi massal, pertukaran barang secara intensif dan ekstensif, terjadinya akumulasi modal, serta tersebarnya ide-ide tentang kebebasan dan hak individu<sup>2</sup>. Sistem kapitalisme dalam perjalanannya sangat membutuhkan berbagai macam jalan untuk mengukuhkan dominasinya dalam menguasai perekonomian dunia. Paham ekonomi liberal pada umumnya digunakan oleh negara – negara Eropa dan Amerika Serikat, sehingga kapitalisme

---

<sup>1</sup> Ben Agger, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*, Yogyakarta: Kreasi wacana, 2003, hal 171.

menjadi sangat identik dengan negara tersebut. Berdasarkan fakta yang ada, bahwa paham liberalisme yang dipelopori oleh ekonom asal Inggris Adam Smith dalam karyanya *The Wealth of Nations*, beberapa dekade yang lalu sempat menjadi dasar bagi ekonomi negara – negara maju seperti Amerika Serikat sekitar tahun 1800 hingga masa kejatuhannya pada periode krisis besar (*Great Depression*). Sejak masa kehancuran itu, tata wacana dunia berubah secara perlahan menuju paham politik sosial dengan argumen kesejahteraan. Sebuah Pemahaman yang meyakini salah satu bagian penting dari tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negaranya. Rakyat berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, akses pendidikan, layanan pengobatan, dan berhak mendapatkan fasilitas sosial lainnya.

Pada tahun 1944 bertempat di Bretton Woods diselenggarakan sebuah konferensi moneter dan keuangan internasional sebagai upaya memecahkan persoalan keuangan internasional yang terpuruk dan mencegah kembali terjadinya depresi ekonomi beberapa dekade terakhir. Sebagian besar negara – negara lebih cenderung pada konsep negara kesejahteraan sebagaimana yang digagas oleh John Maynard Keynes, karena konsep liberalisme dianggap telah mengalami kegagalan. Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.

Perubahan kemudian terjadi seiring krisis minyak dunia tahun 1973, akibat reaksi terhadap dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang Yom

Kippur, dimana mayoritas negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, serta melipatgandakan harga minyak dunia, yang kemudian membuat para elit politik di negara-negara sekutu Amerika Serikat harus berfikir ulang atas dukungannya, sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya lain semakin tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional. Pada situasi inilah ide-ide libertarian sebagai wacana menjadi dominan, tidak hanya di tingkat nasional dalam negeri, tetapi juga di tingkat global. Paham ekonomi tersebut bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan kepada pasar seutuhnya dengan mengacu pada kebebasan. Paham ini yang kemudian dikembangkan oleh Friedrich Von Hayek dan disempurnakan oleh mazhab Chicago yang dipelopori oleh Milton Friedman yang kemudian dikenal dengan istilah Neoliberalisme<sup>3</sup>.

Kemunculan neoliberalisme sebagai teori politik ekonomi pada tahun 1980-an menjadi semakin dominan. Hal penting yang pertama dilakukan oleh Friedman adalah menyerukan penataan kembali sistem mata uang internasional dengan nilai tukar yang fleksibel, tepat setengah dekade setelah perjanjian Bretton Woods di tahun 1944 yang menghasilkan nilai tukar tetap dan berdirinya Dana Moneter Dunia dan Bank Dunia<sup>4</sup>. Istilah neoliberalisme sudah tak asing lagi di telinga kita. Meski tak asing, istilah ini seringkali membuat bingung para pemakainya. Sejauh ini, neoliberalisme dipahami sebagai sebuah kredo yang mengajarkan: prioritas pertumbuhan ekonomi, pentingnya perdagangan bebas

---

<sup>3</sup> Essay Ari Yurino, *Tentang Neoliberalisme*, di [http://rujukan.org/unduh/raji\\_wandjaya.com/2007/10/25/neoliberalisme-2/](http://rujukan.org/unduh/raji_wandjaya.com/2007/10/25/neoliberalisme-2/) yang diakses pada tanggal 05 Desember 2007.

<sup>4</sup> Hans Kung, *Etika Ekonomi Politik Global*, Yogyakarta: Qalam, Agustus 2002, Hal. 317.

untuk merangsang pertumbuhan, pasar bebas yang terbatas, pilihan individual, pemangkasan regulasi pemerintah, dan dukungan pada pembangunan sosial yang evolusioner sesuai dengan pengalaman Barat yang diyakini dapat diterapkan di seluruh dunia<sup>5</sup>.

Dalam prakteknya, neoliberalisme membutuhkan berbagai macam bentuk pengejawantahan dalam melakukan dominasi ekonomi dan politik internasional. Penerjemahan nilai-nilai ekonomi tersebut memerlukan sebuah piranti yang menjalankan kaidah-kaidah ekonomi yang dipahami oleh neoliberalisme. Dalam pemahaman tersebut, ekonomi menjadi satu-satunya faktor dominan yang membentuk kehidupan sosial masyarakat, relasi antar masyarakat dalam sebuah tatanan sosial hanya di tentukan oleh sektor ekonomi dimana yang memiliki akses ekonomi lebih akan menjadi superior ketimbang yang miskin, sehingga kompetisi dalam meraih posisi ekonomi yang tinggi menjadi suatu keharusan. Dengan demikian hal tersebut mengandaikan bahwa sektor ekonomi harus mendapatkan ruang terbesar demi menuju kesejahteraan. Dalam konteks dunia internasional, persoalan ekonomi dalam beberapa bentuk teknisnya seperti uang sebagai alat tukar dan sekaligus yang diperdagangkan, sistem moneter, fiskal, kredit, produksi barang dan jasa, perdagangan bebas, dan lain sebagainya ternyata telah merubah tatanan dunia internasional secara mengejutkan. Secara sederhana bagi siapapun yang mampu mendominasi dan memainkan poin-poin tersebut, maka dialah yang akan memimpin irama dunia internasional. Hal ini telah ditunjukkan oleh neoliberalisme melalui agen-agennya yang membawa nilai tersebut. Salah satu

---

<sup>5</sup> Manfred B. Stegar, *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*, Yogyakarta, Lafadi, 2005, hlm 13.

tangan kanan paling berpengaruh dari paham ini adalah kelompok G8 yang merupakan kumpulan negara – negara maju yang memiliki tujuan dan paham yang sama dalam menjalankan kebijakan internasional terutama dibidang ekonomi dan politik. Didalam aktivitasnya, kelompok ini sangat memfokuskan diri pada persoalan ekonomi dunia khususnya sejak terjadinya krisis ekonomi dunia tahun 1973. Negara-negara G8 seolah merasa bertanggungjawab atas kondisi dan situasi ekonomi internasional, karena secara faktual kelompok tersebut adalah kumpulan negara kaya yang sangat berkepentingan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dunia untuk menjaga kepentingan ekonomi seperti stabilitas moneter dunia dan perdagangan agar tetap terkendali. Kondisi keterpurukan ekonomi dunia yang diakibatkan embargo minyak mentah yang dilakukan negara-negara Arab puluhan tahun silam telah berdampak sangat buruk bagi banyak negara terutama negara industri yang mengalami kerugian terbesar akibat kondisi tersebut. Sejak itulah salah satu alasan terpenting negara-negara industri untuk bersepakat menyatukan kekuatan ekonomi dan politik mereka untuk suatu agenda mendikte ekonomi dunia.

Sejak terbentuknya koalisi ini pada tahun 1975 yang semula terdiri dari Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat (G-6) dan kemudian menjadi 7 Negara setelah bergabungnya Kanada pada tahun 1976 dan terakhir dalam perkembangannya kelompok tersebut menjadi 8 negara, yang kemudian disebut G-8 (*Group of Eight*), setelah Rusia bergabung dalam kelompok tersebut. Secara garis besar G8 merupakan sebuah ancaman serius bagi keberlanjutan kehidupan kemanusiaan saat ini. Dapat dibayangkan, sebuah kelompok negara

yang hanya berjumlah penduduk 14 persen dari total populasi dunia (sekitar 856 juta orang) tetapi menguasai 63 persen atau sekitar 2/3 Gross Domestic Product (GDP) dunia yang setara dengan US\$ 28 trilyun. Dalam konteks itu, Amerika Serikat mengambil porsi terbesar dengan total GDP sebanyak 28 persen, diikuti dengan Jepang (10 persen), dan Jerman (6 persen). Melengkapi dominasinya, negara G8 juga menguasai sekitar ½ (48 persen) dari jumlah voting powers di IMF, dan begitu juga keadaanya di Bank Dunia serta kontrol atas perjanjian-perjanjian perdagangan dalam forum WTO<sup>6</sup>.

Hegemoni G8 sangat tampak dalam banyak agenda internasional yang ternyata di sponsori oleh negara-negara kaya G8. kondisi dunia yang kini mengarah pada konsep pasar bebas merupakan bukti dari manuver gagasan yang disebarkan oleh negara-negara industri maju yang memiliki kepentingan atas pasar tersebut. Persoalan pasar bebas menjadi poin sentral bagi negara industri dalam menjaga kepentingan nasionalnya. Jika dilihat secara geografis, sebagian besar negara-negara industri yang kini tergabung dalam G8 merupakan negara yang memiliki luas teritorial terbatas, sehingga terdapat kebutuhan mendesak untuk terus memperluas wilayah penyebaran hasil-hasil industri dengan cara mengekspor ke negara lain. Maka dari itulah, konsep perdagangan bebas sangat dibutuhkan dunia internasional untuk memberikan ruang legitimasi bagi pergerakan pasar yang semakin berkembang. Fakta menunjukkan bahwa dunia internasional kini sedang dipengaruhi oleh perdagangan lintas batas yang diperankan oleh perusahaan multinasional maupun negara-negara kaya. Kehadiran

---

<sup>6</sup> Lihat pernyataan sikap Koalisi Anti Hutang di Jakarta, [http://kau.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=94&Itemid=6](http://kau.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=6) yang diakses pada tanggal 05 Desember 2007.

G8 akhirnya menjadi sangat berpengaruh dalam melanggengkan model perdagangan tersebut. Dengan menyatunya negara-negara industri dalam sebuah forum misi bersama tentu menambah kekuatan bagi negara kaya untuk terus memberikan pelayanan ekonomi kepada negara-negara terbelakang melalui program-program atau lembaga internasional.

Meskipun dalam pelaksanaannya program-program maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh G8 melalui pertemuan-pertemuan rutinnya tidak sepenuhnya diterima dan diterapkan oleh negara berkembang yang menjadi target utama kelompok tersebut. Pasca krisis yang melanda Asia misalnya, ada beberapa negara yang tidak menerapkan resep kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga brettonwood yang dimotori oleh negara kaya G8. Hasilnya, kini negara tersebut lebih cepat memulihkan dampak krisis yang melanda pada masa itu. Cina dan Malaysia adalah contoh yang baik bagi dunia internasional bahwa saran kebijakan yang di gagas oleh negara-negara kaya ternyata tidak selalu berdampak baik bagi negara berkembang yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini setidaknya memberikan gambaran lebih luas bagi negara berkembang lainnya untuk keluar dari dominasi konsesus washington yang hanya membelitkan hutang dalam anggaran belanja negara. Namun demikian, kuasa G8 dalam memainkan irama ekonomi politik internasional yang dirumuskan dalam sebuah pertemuan tertutup mampu memengaruhi persepsi banyak negara untuk mengikuti jejak kebijakan yang diterapkan mayoritas negara barat.

Hegemoni G8 kian tampak dengan keaktifannya mempromosikan nilai-nilai neoliberalisme yang dianggap jalan tunggal menuju kesejahteraan. Setiap

konferensi yang dilakukan G8 selalu mendapat perhatian lebih karena dari sinilah muncul rujukan untuk berbagai kesepakatan global di bidang ekonomi, politik, lingkungan, dll. G8, atau *Group of Eight*, adalah organisasi informal tingkat internasional yang terdiri dari delapan negara anggota yang sangat eksklusif, sebab dari segelintir personal yang merupakan representasi delapan negara kaya inilah yang kemudian menentukan kebijakan untuk seluruh masyarakat internasional. Negara-negara ini bahkan memegang 65% kendali atas perekonomian dunia dan berpengaruh besar di bidang-bidang lainnya. Sementara sisanya ditentukan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang juga terkait erat dengan kepentingan negara-negara G8<sup>7</sup>. Maka jelaslah bahwa G8 merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi neoliberal, dimana G8 merepresentasikan mereka yang menguasai kapital, alat produksi, bahan produksi, pasar dan mengendalikan tenaga kerja. G8 pada prinsipnya merupakan semacam proyek bagi hasil antar negara-negara kapitalis agar tidak terjadi sengketa di antara mereka sendiri demi meraup keuntungan yang maksimal.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, maka penelitian ini akan memfokuskan diri pada rumusan masalah sebagai berikut : ***Bagaimanakah peran G8 dalam mengukuhkan dominasi ekonomi Neoliberalisme?***

---

<sup>7</sup> Lihat artikel Distopia G8 di <http://xtanpahirarki.blogspot.com/> yang diakses pada tanggal 05 Desember 2008.



### C. Kerangka Teori

Dalam penelitian, seorang peneliti haruslah menguasai teori – teori ataupun konsep – konsep yang digunakan untuk membedah persoalan yang dihadapi. Teori dan konsep yang digunakan nantinya akan menjadi landasan ilmiah bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran untuk menghasilkan analisa yang progresif. Dengan demikian, penulis menggunakan dua konsep, yaitu:

1. Konsep Hegemoni.
2. Structural Power.

#### Konsep Hegemoni

Konsep Hegemoni adalah gagasan yang paling sentral dan orisinal dalam filsafat dan teori sosial Gramsci. Hegemoni *is to explain the control of the dominant class in contemporary capitalism. That the dominant class cannot maintain control simply through the use of violence or force*<sup>8</sup>. Hegemoni terjadi ketika masyarakat telah dikuasai oleh kelompok dominan yang dalam pembahasan ini adalah hegemoni negara maju terhadap negara miskin. Praktik dominasi kekuasaan yang terjadi tidak semata-mata diadakan melalui kekerasan fisik, Antonio Gramsci –seorang pemikir neo marxis dari Italia- menyatakan bahwa kekuasaan dapat dilanggengkan melalui strategi hegemoni. Hegemoni yang dimaksudkan oleh Gramsci ialah peran kepemimpinan intelektual dan moral (*intellectual and moral leadership*) untuk menciptakan ide-ide dominan. Gramsci

---

<sup>8</sup> Andrew Edgar and Peter Sedgwick, *Cultural Theory The Key Concepts*, London: Routledge, 1999, Hal. 164.

juga menambahkan dimensi baru pada masalah ini dengan memperluas pengartiannya sehingga hegemoni juga mencakup peran kapitalis beserta anggotanya, baik dalam merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang sudah diperoleh<sup>9</sup>

Berangkat dari kritiknya terhadap konsepsi kekuasaan Karl Marx yang mereduksi praktik dominasi pada struktur ekonomi, Gramsci lebih jauh berpandangan bahwa kekuasaan diperoleh lewat hegemoni ide-ide yang didasarkan atas mekanisme konsensus. Melalui hegemoni, ide-ide yang diciptakan penguasa menentukan struktur kognitif masyarakat. Upaya hegemoni ini berlangsung untuk menggiring persepsi orang dalam kerangka yang telah ditentukan oleh yang berkuasa. Misalnya hegemoni ide mengenai sistem kapitalisme yang menjelma menjadi sebuah sistem yang seolah mampu memberikan pencerahan dan kemakmuran bagi suatu rakyat sehingga akhirnya menggiring banyak negara untuk menerapkan sistem tersebut sebagai pondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, masyarakat akan menerima segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka sebagai sesuatu yang lazim atau bahkan menganggap perubahan tersebut selalu sebagai sebuah kemajuan. Hegemoni secara kultural maupun ideologis beroperasi melalui institusi – institusi masyarakat sipil yang menandakan masyarakat kapitalis liberal yang telah matang. Institusi – institusi tersebut meliputi pendidikan, keluarga, gereja, media massa, dan budaya populer.

---

<sup>9</sup> Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal.21.

Untuk menjaga keberlangsungan proses reproduksi kekuasaan dan relasi kekuasaan, Louis Althusser –salah seorang pemikir neo marxis lainnya– meletakkan negara sebagai institusi sentral yang berperan mempersatukan dan memaksa masyarakat dalam reproduksi kekuasaan. Dimulai dengan merevisi teori marxis tentang *state power*, Althusser membedakan antara kuasa negara (pemeliharaan kekuasaan negara atau perebutan kuasa negara) sebagai tujuan perjuangan kelas politik dan aparatus negara disisi lain.

Dalam pandangan Althusser, kuasa negara masih dapat berubah dan berganti akibat dari perebutan kekuasaan oleh kelas-kelas politik yang ada. Sedangkan aparatus negara relatif bisa bertahan meski terjadi peralihan kekuasaan. Hegemoni dapat dilakukan oleh negara dan sekaligus dapat dilakukan oleh siapapun seperti para pemilik modal yang menguasai pasar sehingga mampu mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Althusser lebih lanjut memaparkan distingsi aparatus negara dalam kaitannya dengan reproduksi kekuasaan. *Pertama*; Aparatus Negara Represif (*Repressive State Apparatus*, RSA) yang bekerja dengan cara represif melalui kekerasan fisik maupun non-fisik, seperti pemerintah, militer, polisi, lembaga peradilan. Yang *kedua*; Aparatus Negara Ideologis (*Ideological State Apparatus*, ISA). Modus kerja ISA berlangsung melalui cara-cara yang ideologis-persuasif, seperti lembaga agama, pendidikan, media massa, partai politik, dan sebagainya<sup>10</sup>. Pada bentuk kedua inilah, negara memperkuat kekuasaannya melalui muatan-muatan ideologi yang

---

<sup>10</sup> Ada juga Aparatus Negara yang berada di kedua posisi tersebut, misal; hukum dapat menggunakan cara represif (penangkapan, hukuman fisik) dan juga memakai cara ideologis (undang-undang, inpres, dll). Lihat Louis Althusser, *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*, Jogjakarta, Jalasutra, hlm 18-20.

tak tampak. Pada posisi ini organisasi internasional seperti G8 dapat menjadi perangkat yang bersifat hegemonik.

Adalah sistem kapitalisme yang menjiwai munculnya G8 sebagai sebuah forum berkumpulnya negara maju dalam melakukan hegemoninya. Hal tersebut dilakukan dengan maksud agar pasar internasional tetap terjaga supaya produksi dan distribusi barang, wacana, dan nilai tetap stabil. Dengan demikian hegemoni yang terjadi tidak akan berakibat pada perlawanan oleh kaum minoritas, sebab masyarakat sangat menikmati agenda hegemonik yang ada tanpa peduli bahwa dibelakang proses tersebut terdapat unsur – unsur penjajahan. Sebuah hubungan hegemonik dapat ditegakkan ketika kelompok berkuasa berhasil mendapatkan persetujuan kelompok subordinat atas subordinasi mereka. dengan kata lain, kelompok – kelompok subordinat menerima segala ide dan kepentingan kelompok berkuasa<sup>11</sup>. Hegemoni tidak hanya berbeda melainkan bertentangan dengan kekuatan, yaitu semakin banyak elemen kekuatan mendominasi, makin sedikit peluang munculnya hegemoni (Bucci-Glucksmann, 1982, hal.120)<sup>12</sup>. Begitulah hegemoni bekerja dalam prakteknya, menuntun kelompok lemah untuk menerima dan melakukan sebuah konsensus yang akan dipatuhi secara bersama, sehingga setelah terjadinya konsensus tersebut maka pada kondisi ini kekuasaan yang bersifat paksaan tidak lagi diperlukan. Dalam konteks dominasi yang dilakukan negara – negara yang tergabung dalam G8 terhadap negara-negara miskin, dengan memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan internasional hegemoni telah berlangsung sedemikian rupa sehingga konsensus telah tercipta antara yang

---

<sup>11</sup> Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 37.

<sup>12</sup> Muhadi Sugiono, *Ibid*, 2006, Hlm.41.

menyediakan fasilitas dengan pengguna jasa tersebut. Maka sangat jelas bahwa hegemoni tersebut selamanya akan bertahan jika struktur internasional tetap menjadi sarana untuk melakukan hegemoni.

Dominasi hegemoni memang cukup sulit untuk dibongkar dibandingkan dengan praktek kolonialisasi yang terjadi beberapa abad silam. Hegemoni terjadi dengan sangat halus dan bersifat jangka panjang. Segala sesuatu yang ditampilkan hanyalah merupakan wajah luar untuk secara perlahan menanamkan dominasi hingga masyarakat tidak memiliki pilihan, selain menerima dan menikmati apa yang terjadi. Pada kondisi ini kesadaran manusia telah dikuasai oleh segenap nilai dan gagasan sehingga kita menganggap bahwa kelompok dominan sebagai teman yang membantu menyediakan segala macam kebutuhan dan keinginan hasrat kita.

### **Structural Power ( Kekuasaan Struktural )**

Structural power merupakan salah satu aliran dalam pemikiran ekonomi politik internasional. Structural power memiliki asumsi bahwa ekonomi merupakan aspek penting yang merupakan kekuasaan yang mampu melakukan kontrol terhadap tindakan suatu negara. Kekuasaan struktural berarti kekuasaan untuk mensetting agenda – agenda diskusi atau peraturan rezim internasional serta kebiasaan – kebiasaan yang bertujuan memimpin hubungan ekonomi internasional. Kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kekuatan untuk membentuk kerangka kerja dalam relasi suatu negara dengan negara lainnya, negara dengan rakyat, maupun hubungan negara dengan korporasi. Menurut Susan Strange:

It is impossible to have political power without the power to purchase, to command production, to mobilize capital. And it is impossible to have

economics power without the sanction of political authority, without the legal and physical security that can only be supplied by political authority.<sup>13</sup>

Maka dari itu, terdapat hubungan yang saling berkelindan antara aspek ekonomi dan politik. Dimana setiap kekuasaan politik berada maka disitu pula keberadaan kekuasaan ekonomi.

Structural power memiliki empat aspek yang merupakan jejaring yang akan memainkan peranan dalam membentuk dan menjalankan kekuasaan tersebut.

1. *Keamanan* : Selalu terdapat kemungkinan adanya ancaman konflik dan kekerasan yang mengancam keamanan personal maupun negara, maka bagi siapa yang mampu memberikan suatu penawaran perlindungan untuk mengatasi ancaman itu, akan mendapatkan kekuasaan tersebut.
2. *Produksi* : Kontrol terhadap produksi dimaksudkan sebagai suatu susunan penentuan terhadap mekanisme produksi yang menyangkut apa yang mesti diproduksi, siapa yang memproduksi, bagaimana proses produksi dan sebagainya. produksi merupakan pondasi dari ekonomi politik. Terdapat suatu keterkaitan yang erat antara kekuasaan dan struktur produksi. Jika terjadi perubahan pada struktur produksi, maka akan mengakibatkan perubahan yang besar terhadap distribusi sosial dan kekuasaan politik suatu kelompok atau negara.
3. *Finansial / keuangan* : kekuasaan untuk menciptakan kredit merupakan aspek selanjutnya dalam menciptakan kekuasaan struktural yang mapan.

---

<sup>13</sup> Susan Strange, *States and Markets*, London, Pinter Publishers, 1988, hlm. 25.

Penciptaan kredit berarti memberikan atau mengizinkan pihak lain untuk melakukan pengeluaran pembelanjaan tanpa pembayaran secara nominal sehingga daya beli akan meningkat. Artinya belanja hari ini dapat dibayar dikemudian hari. Struktur finansial memiliki dua aspek yang tidak terpisahkan yang tidak hanya mengkompromikan ekonomi politik melalui penciptaan kredit, namun juga melalui sistem moneter. Pertama, kekuasaan untuk menciptakan kredit dilakukan oleh pemerintah dimana terdapat ketergantungan pada relasi politik dan regulasi. Dan kedua, kebijakan pemerintah melalui pasar yang terkait dengan nilai tukar antar mata uang yang berbeda. Secara sederhana struktur finansial bisa dipahami sebagai sejumlah pengaturan akan ketersediaan kredit serta faktor – faktor penentu kondisi pertukaran mata uang.

4. *Pengetahuan / ide* : struktural power bisa diraih melalui pengetahuan. Hal ini dimaksudkan bahwa bagi siapa pun yang memiliki susunan pengetahuan / ide dimungkinkan untuk meraih kekuasaan. Pengetahuan bukan merupakan sesuatu yang bebas nilai, tetapi sebaliknya tata wacana yang dimunculkan oleh seseorang atau kelompok selalu terdapat kuasa simbolik sehingga melahirkan kekerasan simbol sebagai sebuah mekanisme sosial untuk mereproduksi kekuasaan.

Diantara empat aspek yang terdapat dalam analisa structural power, bahwa finansial memainkan peranan yang lebih signifikan dalam membentuk dan menjalankan kuasa dalam kaitannya dengan hubungan antar negara. Finansial dapat dimaknai sebagai suatu sarana yang dapat membentuk suatu tatanan di

dunia internasional yaitu hubungan – hubungan yang saling berkelindan yang terkait satu sama lain dalam hubungannya dengan kredit dan moneter. Persoalan moneter, mata uang, kredit, hutang merupakan faktor – faktor dominan yang selama ini sangat berpengaruh dalam tata dunia internasional. Struktur Finansial digambarkan oleh Susan Strange seperti sebuah rumah di pertengahan jalan, suatu percampuran bagian antara sistem global dan bagian lainnya terdiri dari sistem moneter dan finansial nasional. Dia menjadi global dikarenakan sebagian besar pasar internasional memiliki keterkaitan yang erat secara bersama – sama sebagai sebuah sistem yang utuh<sup>14</sup>. Maka dari itu, mekanisme pasar global pada saat tertentu dapat lebih berpengaruh secara signifikan melampaui batas – batas regulasi politik. Dengan demikian, secara perlahan namun pasti negara sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam arena nasional akan ikut terpengaruh oleh kapital yang berputar di level internasional. Dan bagi siapapun yang mampu untuk memberikan layanan finansial yang kuat, maka dia yang akan memiliki kontrol terhadap negara – negara yang menggantungkan dirinya pada kapital tersebut. Pada kondisi inilah negara tidak lagi memiliki otoritas penuh terhadap kebijakan – kebijakan yang akan dikeluarkan.

Dalam kaitannya G8 sebagai kelompok negara – negara yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi, sudah tentu mereka yang notabeneanya merupakan penganut sistem ekonomi kapitalis akan memainkan aspek finansial sebagai senjata ampuh untuk melakukan dominasi terhadap negara – negara dunia ketiga dan ekonomi dunia.

---

<sup>14</sup> Susan Strange, *Ibid*, 1988, hlm. 88.



#### **D. Hipotesa**

Dengan menyebarkan gagasan liberalisasi dan menguasai struktur-struktur internasional, G8 semakin mengukuhkan dominasi dan hegemoni neoliberalisme terhadap ekonomi politik dunia.

#### **E. Metode Penulisan**

Penelitian ini merupakan bentuk studi pustaka, dengan menggunakan metode kualitatif sehingga data yang diperoleh merupakan data sekunder yang didapatkan dari buku-buku literatur, surat kabar, makalah ilmiah, jurnal, majalah dan situs-situs internet dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan. Standar penulisan yang digunakan adalah standar penulisan ilmiah dengan tambahan data kuantitatif berupa tabel atau grafik perkembangan apabila diperlukan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas penulisan dan sarana pembuktian hipotesa namun tetap menjaga keaslian tulisan.

#### **F. Jangkauan Penulisan**

Demi menghindari pembahasan yang terlalu luas, skripsi ini akan memfokuskan diri pada pembahasan peran G8 sebagai lembaga penyokong neoliberal dalam menanamkan cengkeramannya di arena politik ekonomi internasional guna mengukuhkan dominasi ekonomi kapitalisme.

#### **G. Tujuan Penulisan**

Penelitian ini diantaranya bertujuan :

- a. Memberikan sumbangan wacana bagi studi ekonomi politik dalam Ilmu Hubungan Internasional.
- b. Berusaha menjelaskan secara lebih mendalam mengenai tata wacana neoliberalisme dalam kaitannya dengan kehadiran G8 sebagai organisasi pendukung paham kapitalisme.
- c. Mencoba untuk membongkar dominasi ekonomi kapitalisme dalam skala global.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab dan sub bab sesuai dengan ketentuan penulisan skripsi.

Dalam BAB I penulis akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan perangkat-perangkat yang diperlukan bagi penulisan skripsi ini seperti latar belakang masalah yang memberikan landasan gambaran masalah yang akan dipaparkan lebih lanjut. Kemudian seperti kerangka teori sebagai sebuah alat analisa yang digunakan untuk membedah pokok permasalahan yang sedang dibahas.

BAB II lebih diarahkan pada pembahasan mengenai neoliberalisme baik tentang sejarahnya maupun agenda-agenda yang merupakan bagian dari neoliberalisme seperti G8 yang secara khusus dibahas dalam skripsi ini.

BAB III membahas beberapa hal yang secara signifikan menghambat laju gerak dominasi neoliberalisme. Dalam BAB ini penulis membahas gerakan revolusi di Venezuela dan gagasan Grameen Bank Muhammad Yunus, serta

BAB III membahas beberapa hal yang secara signifikan menghambat laju gerak dominasi neoliberalisme. Dalam BAB ini penulis membahas gerakan revolusi di Venezuela dan gagasan Grameen Bank Muhammad Yunus, serta ekonomi syariah yang merupakan representasi dari hambatan yang akan dihadapi oleh neoliberalisme.

BAB IV lebih difokuskan pada pembahasan tentang cara dan peran G8 dalam mengukuhkan dominasi ekonomi neoliberalisme dengan menyebarkan gagasan tentang liberalisasi dan menguasai lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan WTO.

Sedangkan BAB V merupakan kesimpulan dari pembahasan dari penulisan skripsi ini.

## **I. Kerangka penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pokok Permasalahan
- C. Kerangka Teori
- D. Hipotesa
- E. Metode penulisan
- F. Jangkauan Penulisan
- G. Tujuan Penulisan
- H. Sistematika Penulisan

**BAB II : DOMINASI EKONOMI POLITIK NEOLIBERALISME DAN  
HAMBATANNYA.**

- A. Sejarah Kemunculan Neoliberalisme
- B. Menuju Era Pasar Bebas
- C. Revolusi Bolivarian Melawan Neoliberalisme
- D. Grameen Bank Sebagai Ekonomi Alternatif Dunia

**BAB III : Signifikansi G8 dalam mengukuhkan Ekonomi Neoliberalisme**

- A. Aktivitas G8 Dalam Dunia Internasional
- B. G8 Sebagai Tangan Kanan Neoliberalisme

**BAB IV : MEMANFAATKAN STRUKTUR INTERNASIONAL DAN  
GLOBALISASI EKONOMI**

- A. Liberalisasi Ekonomi, Privatisasi, dan Deregulasi.
- B. Memanfaatkan Lembaga Internasional; IMF, World Bank,  
dan WTO

**BAB V : KESIMPULAN**